

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di madrasah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya.¹

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di madrasah. Karena seluruh komponen pendidikan di madrasah erat kaitannya dengan komponen keuangan madrasah. Masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas madrasah. Banyak madrasah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, maupun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.²

¹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.23.

² E.Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.193.

Pembiayaan yang termasuk salah satu standar nasional pendidikan menjadi faktor yang menentukan dalam tercapainya suatu tujuan pendidikan. Standar Pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) BAB IX pasal 63 menyebutkan bahwa:

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.³

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Komponen manajemen keuangan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik itu kecil maupun besar. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

menunjang tercapainya tujuan pendidikan.⁴ Sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.⁵

Dalam hal inilah pendidikan perlu dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas sekaligus mempunyai penduduk yang sangat banyak.

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan madrasah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada madrasah. Dalam hal ini, kepala madrasah dibantu semua staf dalam sebuah madrasah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan madrasah.⁶

Manajemen keuangan madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan

⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.47.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.8.

⁶ Mulyasa, *Menjadi Kepala...*, hlm.194.

transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, sistem pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang sangat menentukan dalam pelaksanaan proses pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.⁷

Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selaludi hadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah diamanatkan negara yaitu sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada BAB II, Fungsi dan Tujuan Pendidikan, Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

⁷ *Ibid*, hlm.194.

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.⁸

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut secara menyeluruh dan profesional, salah satunya adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber daya yang sangat diperlukan madrasah sebagai alat untuk kelengkapan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi. Kelengkapan sarana prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar, dan memudahkan guru dalam mengajar. Oleh karena itu, kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan madrasah dengan baik, bertanggung jawab, dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁹

Indonesia mempunyai dua model pendidikan berbeda yang diatur oleh dua kutub yang berbeda sehingga menghasilkan dua corak pendidikan yang berbeda pula. Kementerian Pendidikan Nasional membawahi sekolah-sekolah umum mulai SD hingga SMA, serta SMK, sedangkan Kementerian Agama membawahi madrasah-madrasah mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, serta Madrasah Aliyah Kejuruan. Manajemen pada sekolah-sekolah umum bisa dikatakan lebih unggul jika dibandingkan dengan manajemen pada madrasah-madrasah, karena madrasah pada

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 8.

⁹ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 130.

umumnya dikelola oleh yayasan penyelenggara pendidikan, selain itu siswa-siswa madrasah kebanyakan berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, merupakan lembaga pendidikan yang paling berkembang pesat di antara lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Kecamatan Pekuncen, terutama diantara madrasah-madrasah yang bernaung di bawah Majelis Wakil Cabang (MWC) Ma'arif NU Anak Cabang Pekuncen. Dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembiayaan pendidikan yang digunakan pada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dengan keterbatasan sumber pendanaan yang dimilikinya serta siswa-siswanya yang sebagian besar berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Namun demikian kedua madrasah ibtidaiyah tersebut tetap eksis dan semakin berkembang di tengah persaingan mutu pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Madrasah ibtidaiyah sebagai salah satu lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, merupakan lembaga pendidikan non pemerintah di

bawah pembinaan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang keberadaannya sangat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia terutama di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan, membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional, baik dalam penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya.

Sebagai madrasah swasta, sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, tentunya terdapat perbedaan dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang telah lebih mapan, terutama sekolah-sekolah negeri. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, madrasah-madrasah tersebut masih tetap bisa tumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Disinilah salah satu permasalahan yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini; yakni bagaimana sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas yang menjadi pembeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya pada tingkatannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis berbagai persoalan yang terkait dengan sistem pembiayaan pendidikan, khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01

Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Berbicara mengenai keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di madrasah. Karena seluruh komponen pendidikan erat kaitannya dengan komponen keuangan madrasah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas madrasah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana, dan sumber belajar. Banyak madrasah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan atau pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup.

Pemerintah melalui beberapa kebijakannya telah banyak membantu sekolah/madrasah yang bertujuan untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Misalnya kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan-bantuan lainnya. Namun demikian, secara signifikan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah belum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01

Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Persoalannya terletak pada dasar sistem pembiayaannya. Sehingga berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dengan judul penelitian "*Sistem Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 1 Kranggan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas*"

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mengarah pada persoalan utamanya. Sebagaimana juga penelitian ini agar lebih terarah dan tersistem dengan baik, maka penulis akan fokuskan penelitian ini pada sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Alasan penulis memilih dua madrasah tersebut adalah letak geografis yang mewakili lokasi desa terpencil dengan desa yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, serta keduanya cenderung menunjukkan tingkat pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih baik dibanding madrasah ibtidaiyah lainnya di Kecamatan Pekuncen

Kabupaten Banyumas, meskipun dengan kondisi siswa-siswanya yang sebagian besar berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan dengan sumber pendanaan pendidikan di kedua madrasah tersebut yang serba terbatas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan sistem manajemen keuangan madrasah, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis diharapkan secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai manajemen keuangan madrasah dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu bagi para pengelola madrasah.
2. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang sistem pembiayaan pendidikan di madrasah ibtidaiyah.
3. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan untuk memenuhi syarat akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar magister.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis dan saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Dimana dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua membahas tentang kajian teoritik; yakni pembahasan mengenai konsep sistem pembiayaan pendidikan madrasah. Bab ini akan terbagi menjadi 4 sub bab yang meliputi sistem keuangan, sistem manajemen keuangan, kerangka teori, dan hasil penelitian yang relevan.

Selanjutnya bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat berisi tentang pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Dimana sub bab ini meliputi gambaran umum MI Ma'arif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 01 Kranggan, sistem pembiayaan pendidikan MI Ma'arif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 01 Kranggan, analisis pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan MI Ma'arif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas yaitu sistem *budgeting*, sistem *accounting*, dan sistem *auditing*, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan MI Ma'arif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Dan sebagai akhir dari sistematika tesis ini adalah bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk dapat memberikan gambaran ringkas dan lugas, maka dalam sebuah penelitian perlu adanya kesimpulan hasil penelitian. Demikian halnya dengan hasil penelitian ini, berdasarkan pada pemaparan bab-bab sebelumnya, maka terkait penelitian ini yang berjudul *Sistem Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas*, berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan; secara administratif telah menunjukkan tata kelola keuangan yang positif, bahkan cenderung sistematis.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan penganggaran sampai dengan pengawasan keuangan yang telah dibukukan secara rapi dan tertib. Selain itu, sisi operasionalisasi penggunaan keuangan madrasah baik yang berasal dari pemerintah, orangtua siswa, maupun pihak-pihak yang secara insidental memberikan bantuannya juga secara proporsional dialokasikan dengan mengacu pada penganggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sistem pembiayaan pendidikan madrasah yang diawali dari penganggaran (*budgeting*) benar-benar ditentukan berdasar pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan menerapkan skala prioritas dalam tiga jangka penggunaan; yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sedangkan dalam pembukuannya pada kedua madrasah tersebut menerapkan sistem pembiayaan pendidikan dua sisi, yaitu pembukuan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah dan pembukuan yang bersifat internal (sumber dana dari orangtua siswa ataupun pihak lain yang san tetapi tidak mengikat).

Pembukuan keuangan sesuai peraturan pemerintah juga secara berkala dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan; serta pembukuan yang bersifat insidental (sesuai dengan program yang diperoleh dari pemerintah). Untuk pembukuan keuangan yang dilaksanakan secara rutin adalah pembukuan keuangan yang bersumber dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Pendamping dan Bantuan Siswa Miskin.

Untuk pengawasan (*controlling*) kedua madrasah ini menerapkan tiga elemen yang secara langsung dapat turut mengawasi jalannya pendapatan dan penggunaan keuangan. 1). Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten yang secara rutin bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah; 2). Kepala madrasah sebagai kuasa pengguna anggaran juga secara terus menerus melakukan pengawasan dan perbaikan yang

diperlukan baik yang bersifat administratif maupun operasional; baik berhubungan dengan pemerintah maupun berhubungan dengan orangtua siswa dan pihak lain yang sah; 3). Komite madrasah yang secara berkala mendapatkan laporan dari kepala madrasah, sehingga komite madrasah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal operasional keuangan madrasah.

3. Faktor pendukung berjalannya sistem pembiayaan pendidikan baik di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan maupun Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan adalah sumber daya manusia yang ada di dalamnya secara komulatif memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan *teamwork* yang dibangun oleh seluruh elemen personalia yang ada juga nampak harmonis. Sehingga, untuk menjalankan seluruh yang terkait keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Terlebih utama adalah bendaharawan yang memiliki kemampuan bidang administrasi serta akuntansi sangat mendominasi tata kelola dan tata laksana keuangan madrasah.

Selain itu, kerjasama baik dengan pemerintah dan masyarakat yang telah terjalin selama ini untuk lebih ditingkakan, agar segala persoalan yang bersifat *urgent* dapat diselesaikan dan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tingkat responsif masyarakat kategorinya cukup baik, hal ini nampak dari masukan-masukan yang membangun bagi jalannya roda penganggaran dan penggunaan keuangan madrasah.

4. Faktor penghambat dalam merealisasikan sistem pembiayaan pendidikan pada kedua madrasah ini adalah kurang responsifnya masyarakat (terutama orangtua siswa dan pihak lain) atas penggunaan anggaran madrasah. Pengawasan oleh masyarakat ini belum dapat dijalankan secara maksimal, oleh karena sikap masyarakat yang masih sekedar mempercayakan segala keuangan yang diperoleh madrasah baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga, ketidak-pahaman pada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan keuangan madrasah masih sering muncul (baik secara langsung maupun tidak langsung disampaikan kepada pihak madrasah).

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pejabat fungsional yang dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten, melalui petugasnya untuk tetap memberikan bimbingan, masukan, dan pengawasan terkait perencanaan, pembukuan, serta monitoring terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sumber keuangan yang rutin maupun insidental juga perlu terus dimonitoring secara berkesinambungan, agar pihak madrasah dapat menggunakan dan melaporkan keuangan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sistem manajemen keuangan madrasah yang secara administratif sudah berjalan dengan baik untuk dapat dipertahankan. Terutama penerapan administratif dan operasionalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Begitu juga daya dukung laporan penggunaan keuangan, baik yang memerlukan pajak maupun tidak tetap dipertahankan pengadministrasiannya.
3. Kepala madrasah dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang terkait penggunaan keuangan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan madrasah.

Selain papan informasi keuangan yang dapat dilihat secara umum, maka jika diperlukan, maka pihak madrasah melayangkan surat laporan penggunaan keuangan secara berkala. Hal ini, bertujuan agar pengawasan penggunaan yang utamanya bersumber dari masyarakat akan lebih memacu daya semangat masyarakat memberikan daya dorong juga dukungannya demi keberlangsungan madrasah kedepan agar lebih berkembang.

4. Memandang pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi dewasa ini, maka pihak madrasah perlu menerapkan sistem informasi berbasis internet. Tujuan program berbasis teknologi informasi ini adalah untuk mendukung dan mendorong masyarakat secara luas mengetahui rancangan hingga penggunaan keuangan madrasah.

C. Kata Penutup

Syukur al-hamdu lillāh kehadiran Allah SWT atas segala ni'mat dan rida yang diberikan kepada diri penulis, sehingga penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis juga menyadari betul bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat ketidak-sempurnaan (baik sisi penulisan maupun isi). Namun penulis berharap, semoga hasil sederhana ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Dan untuk dapat lebih menyempurnakan hasil karya tesis ini, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun demi semakin menambah kematangan dan kesempurnaan penelitian ini.



IAIN PURWOKERTO